

KEBIJAKAN PUBLIK

Nazaruddin., S.Sos, M.AP

Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosian dan Ilmu Politik
Universitas Malikussaleh

Berbagai Hal Penting Menyangkut Kebijakan Publik

- ▶ Latar belakang munculnya study kebijakan publik
- ▶ Siapa sebenarnya stakeholders yang terlibat
- ▶ Bagaimana proses perumusan kebijakan itu dilakukan
- ▶ Bagaimana implementasi dilakukan
- ▶ Apa hasil-hasil kebijakan
- ▶ Apakah hasil-hasil kebijakan mampu mencapai tujuan kebijakan, termasuk di dalamnya memuaskan nilai-nilai yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita

Arti Pentingnya Studi Kebijakan Publik

- ▶ Untuk pengembangan ilmu pengetahuan (alasan ilmiah)
- ▶ Membantu para praktisi dalam memecahkan masalah (alasan profesional)
- ▶ Berguna untuk tujuan politis (alasan politik)

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan (alasan ilmiah)

- Menempatkan kebijakan publik sebagai variabel terpengaruh (dependent variable), shg berusaha menentukan variabel pengaruhnya (independent variable)
- Misal :
 - Studi utk identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dikeluarkan UU Anti Terorisme
 - Studi utk menganalisis dampak kebijakan kenaikan harga BBM

Membantu para praktisi dalam memecahkan masalah (alasan profesional)

- ▶ Dasar teoritis utk membuat kebijakan publik yang baik dan memperkecil kegagalan dari kebijakan publik
- ▶ Misal:
- ▶ Dasar teoritis baik secara ekonomi dan sosial mengenai kebijakan menaikkan harga BBM

Berguna untuk tujuan politis (alasan politik)

- ▶ Kebijakan publik yang disusun melalui proses yang benar dengan dukungan teori yang kuat memiliki posisi yang kuat terhadap kritik dari lawan politiknya.
- ▶ Kebijakan tdk mudah dicabut krn alasan kepentingan sesaat lawan politik

Latar Belakang Munculnya Studi Kebijakan Publik (1)

Pemikiran-pemikiran tentang Kebijakan Publik sebenarnya bukanlah hal baru, baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

Sebagai satu studi/disiplin ilmu yang dapat ditinjau dalam literatur dan kurikulum PT, khususnya di Indonesia masih relatif baru.

Di UGM sendiri, baru pada awal 1990-an studi Kebijakan Publik menemukan eksistennya, setelah program Magister Administrasi Publik (MAP) membuka konsentrasi Kebijakan Publik.

Latar Belakang Munculnya Studi Kebijakan Publik (2)

Sebelumnya, perihal kebijakan publik selalu dikaitkan dengan Ilmu Politik, yaitu bagaimana legislatif mengambil keputusan politik

Berbeda dengan asal lahirnya studi Kebijakan Publik, di Amerika Serikat studi ini sudah berkembang pada tahun 1970

Bukti-bukti berkembangnya studi Kebijakan Publik di USA adalah dengan banyaknya literatur yang dapat kita peroleh dan baca.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa di awal lahirnya studi Kebijakan Publik banyak dipengaruhi oleh Ilmu Politik. Misalnya Ripley (1985) yang banyak melakukan kajian Kebijakan Publik melalui pendekatan Ilmu Politik

Mengapa Kebijakan Publik Dibutuhkan? (1)

1.

- Adanya masalah yang dihadapi, baik pemerintah maupun publik

2.

- Semakin tingginya tuntutan publik

Mengapa Kebijakan Publik Dibutuhkan? (2)

Dalam perkembangan paradigma Administrasi Publik, tugas Administrasi Publik tidak lagi hanya bersifat manajerial/instrumental yaitu hanya melaksanakan kebijakan, melainkan juga berperan dalam merumuskan kebijakan

Pendekatan Studi

- Analisis Kebijakan (policy analysis)
 - Fokus : studi pembuat keputusan (decision making) dan penetapan kebijakan (policy formation)
- Kebijakan Publik Politik (political public policy)
 - Hasil dan outcome kebijakan publik, melihat interaksi politik sebagai faktor penentu

PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK

- WHAT EVER GOVERNMENT CHOOSE TO DO OR NOT TO DO. (Thomas Dye, 1981)
 - Dibuat oleh badan pemerintah bukan swasta
 - Pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan badan pemerintah
- Kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. (James E. Anderson, 1979)

PENGERTIAN ...(lanjutan)

- ▶ *A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern* (serangkaian tindakan yang dipilih secara sengaja oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang dimaksudkan untuk mengatasi suatu masalah) (Anderson, 1984).
- ▶ Adalah cara dan tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah pembangunan tertentu atau untuk mencapai tujuan pembangunan tertentu dengan mengeluarkan keputusan, strategi, perencanaan, maupun implementasinya dengan menggunakan instrumen tertentu (World Agroforestry, 2003).

PENGERTIAN ...(lanjutan)

- ▶ Tindakan yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau pejabat pemerintah dalam bidang masalah yang luas, misalnya pertahanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian kriminalitas, urbanisasi, dll. (W.N. Dunn, 1994).
- ▶ Tindakan pemerintah, baik yang dilakukan sendiri atau melalui lembaga lain yang mempengaruhi kehidupan publik (G. Peters).
- ▶ Apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah (T.R.Dye, 1975).

PENGERTIAN ...(lanjutan)

- Apa yang dikatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan mrpk serangkaian tujuan dan sasaran dr program-program pemerintah (George Edward III).
- Alokasi nilai yang otoritatif untuk seluruh masyarakat, akan tetapi hanya pemerintahlah yang dapat berbuat secara otoritatif untuk seluruh masyarakat, dan semuanya yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau untuk tidak dikerjakan adalah hasil-hasil dari alokasi nilai-nilai tersebut (David Easton).

PENGERTIAN ...(lanjutan)

- ▶ Tidak ada definisi kebijakan publik yg bisa diterima secara umum.
- ▶ Pendefinisian kebijakan publik harus mempunyai pengertian mengenai apa yg sebenarnya dilakukan drpd apa yg diusulkan dlm tindakan mengenai suatu persoalan tertentu. Hal ini dimaksudkan krn kebijakan mrpk suatu proses yg mencakup pula tahap implementasi dan evaluasi shg definisi yg hanya menekankan pada apa yg diusulkan menjadi kurang memadai.



Kerangka Kerja

- ▶ Tujuan yang akan dicapai
- ▶ Preferensi nilai yang perlu dipertimbangkan
- ▶ Sumber daya yang mendukung kebijakan
- ▶ Kemampuan aktor yang terlibat pembuatan kebijakan
- ▶ Lingkungan : sosial, politik, ekonomi
- ▶ Strategi mencapai tujuan

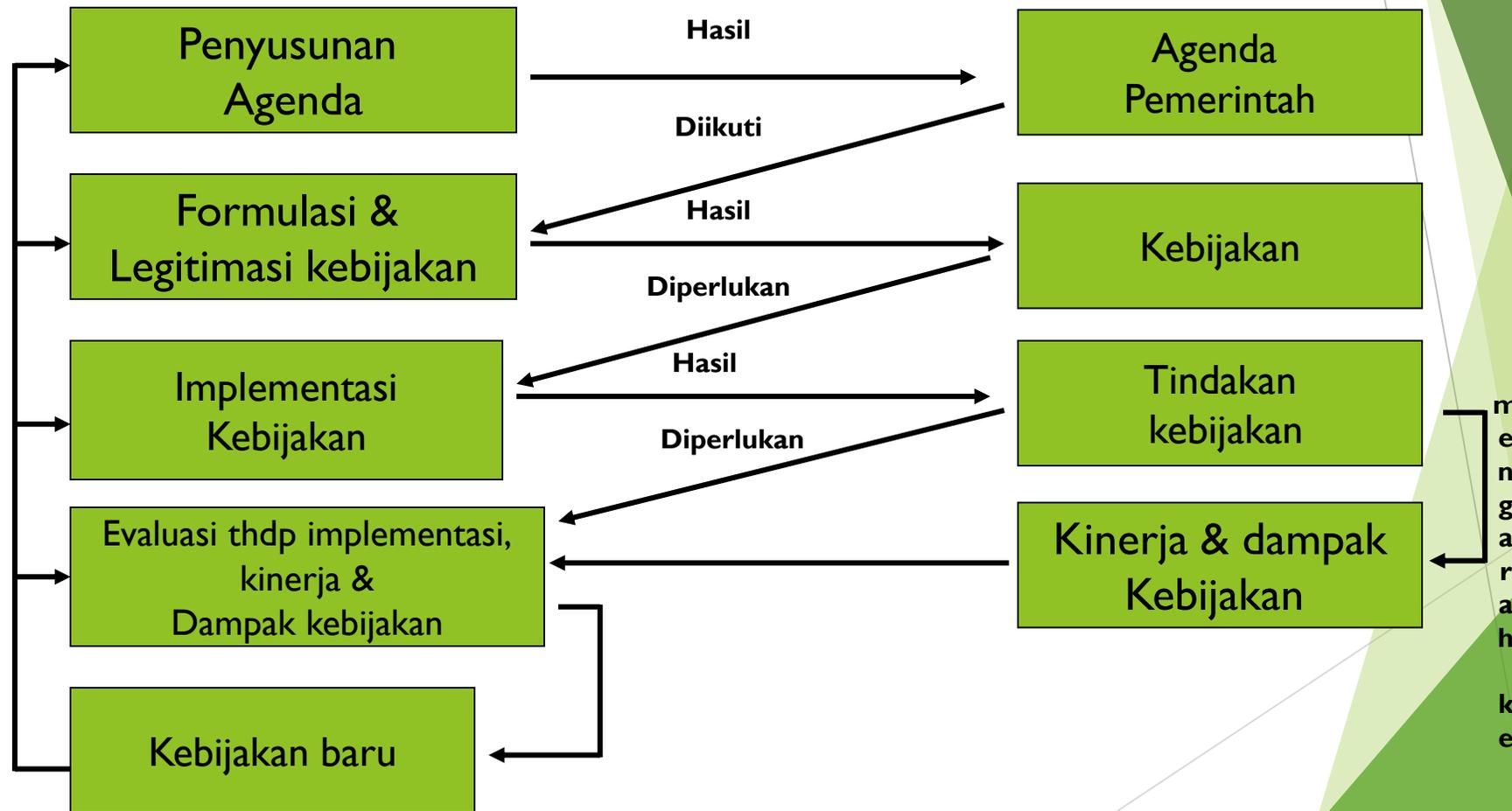
Proses Kebijakan Publik

- ▶ Proses kebijakan publik merupakan proses yang amat rumit dan kompleks. Untuk mengkajinya para ahli kemudian membagi proses kebijakan publik ke dalam beberapa tahapan. Tujuannya untuk mempermudah pemahaman terhadap proses tersebut.

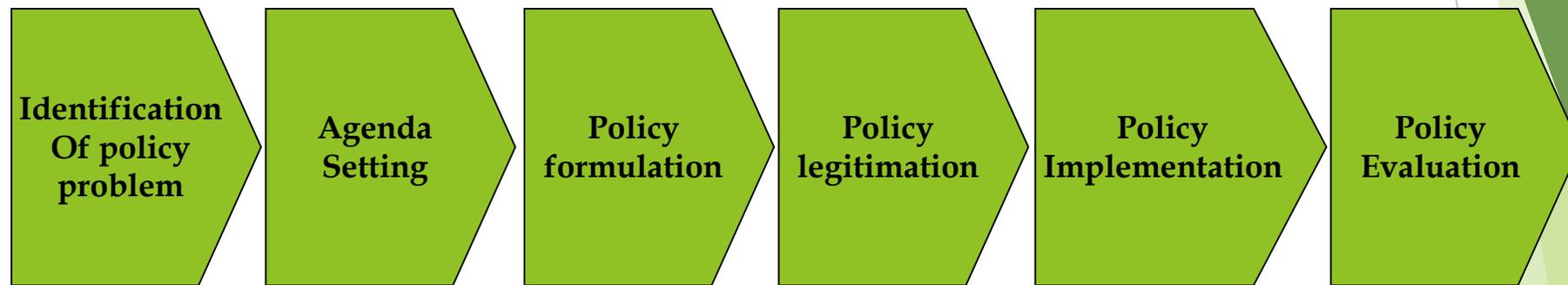
Proses/Tahapan Kebijakan Publik (William N. Dunn)



Tahapan Kebijakan Publik (Ripley)



Proses Kebijakan Publik (Thomas R. Dye)



Tahap Penyusunan Agenda

- ▶ Dalam penyusunan agenda ini policy makers membahas masalah-masalah yang masuk dari masyarakat dan diteruskan apakah masalah-masalah tersebut perlu atau tidak untuk ditangani. Meskipun banyak masalah yang masuk dlm agenda pemerintah, namun tdk semuanya dpt mencapai “ status agenda”.
- ▶ Ahli kebijakan publik mengakui bhw penyusunan agenda mrpk suatu tahapan yg amat sulit dlm kebijakan publik. Ini disebabkan banyaknya aktor yg terlibat dan bervariasinya kepentingan yg mereka wakili.

Tahap Formulasi Kebijakan

- ▶ Masalah yg telah masuk ke agenda kebijakan dibahas oleh para pembuat kebijakan.
- ▶ Masalah tersebut didefinisikan utk dicari alternatif pemecahan yg terbaik.
- ▶ Dibuat banyak alternatif utk penyelesaian masalah.
- ▶ Masing-2 alternatif bersaing utk dipilih.
- ▶ Setiap aktor kebijakan akan bersaing utk menentukan alternatif.
- ▶ Informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah

Tahap Adopsi Kebijakan

- Dari banyak alternatif kebijakan yg ditawarkan oleh para perumus kebijakan, akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tsb diadopsi dg dukungan para aktor (misal mayoritas legislatif) atau konsensus antaraktor.
- Informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif yg ditawarkan

Tahap Implementasi Kebijakan

- Pada tahap ini alternatif kebijakan yg telah ditetapkan tadi dilaksanakan oleh unit-unit administratif dg memobilisasi berbagai sumberdaya.
- Bisa terjadi implementasi kebijakan ini memperoleh atau tdk memperoleh dukungan dr para pelaksana.
- Informasi konsekuensi sekarang dan masa lalu diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya

Tahap Evaluasi Kebijakan

- Kebijakan yg telah diimplementasikan kemudian dinilai utk melihat sejauh mana atau tingkat keberhasilan kebijakan yg dibuat telah mampu memecahkan masalah utk meraih dampak yg diinginkan.
- Perlu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yg menjadi dasar utk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yg diinginkan.
- Informasi mengenai kinerja atau hasil dari kebijakan



Kerangka Kerja

- ▶ Tujuan yang akan dicapai
- ▶ Preferensi nilai yang perlu dipertimbangkan
- ▶ Sumber daya yang mendukung kebijakan
- ▶ Kemampuan aktor yang terlibat pembuatan kebijakan
- ▶ Lingkungan : sosial, politik, ekonomi
- ▶ Strategi mencapai tujuan

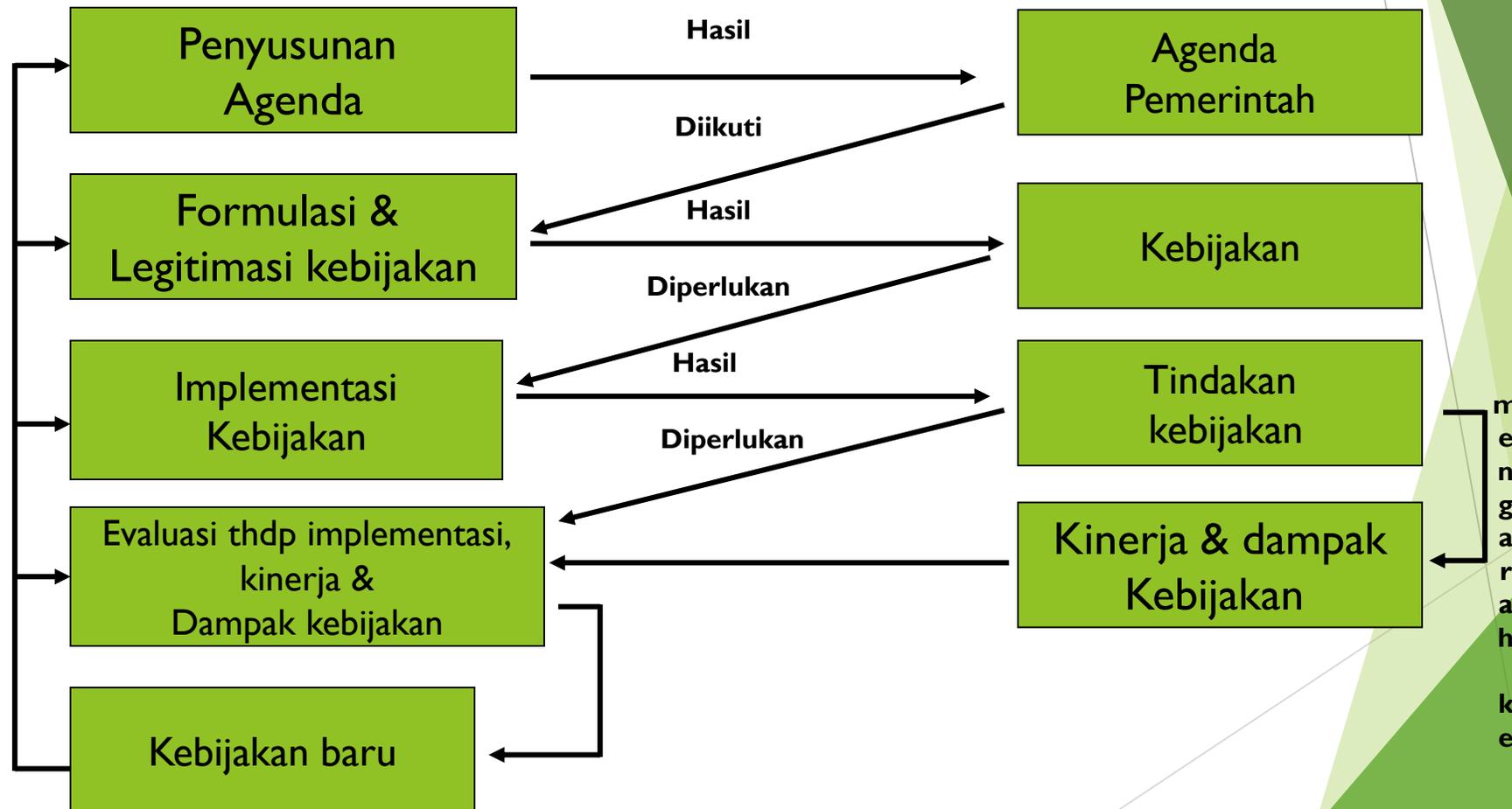
Proses Kebijakan Publik

- ▶ Proses kebijakan publik merupakan proses yang amat rumit dan kompleks. Untuk mengkajinya para ahli kemudian membagi proses kebijakan publik ke dalam beberapa tahapan. Tujuannya untuk mempermudah pemahaman terhadap proses tersebut.

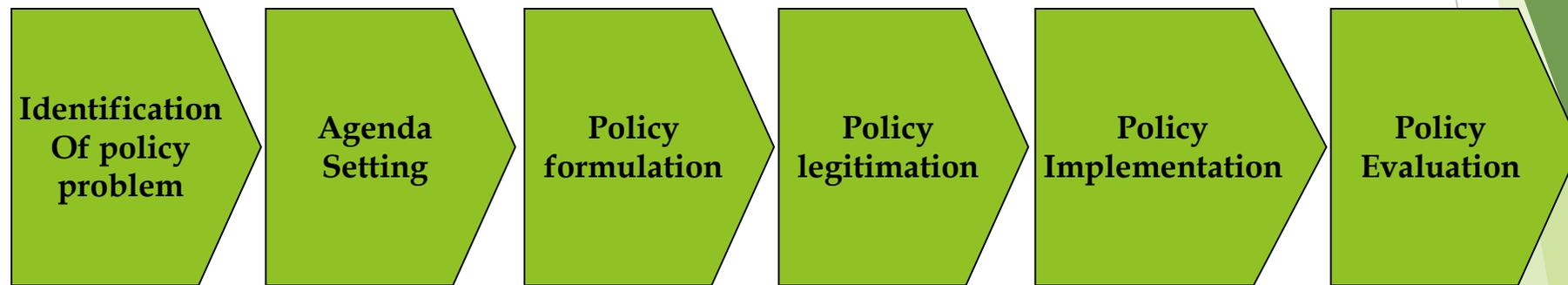
Proses/Tahapan Kebijakan Publik (William N. Dunn)



Tahapan Kebijakan Publik (Ripley)



Proses Kebijakan Publik (Thomas R. Dye)



Tahap Penyusunan Agenda

- ▶ Dalam penyusunan agenda ini policy makers membahas masalah-masalah yang masuk dari masyarakat dan diteruskan apakah masalah-masalah tersebut perlu atau tidak untuk ditangani. Meskipun banyak masalah yang masuk dlm agenda pemerintah, namun tdk semuanya dpt mencapai “ status agenda”.
- ▶ Ahli kebijakan publik mengakui bhw penyusunan agenda mrpk suatu tahapan yg amat sulit dlm kebijakan publik. Ini disebabkan banyaknya aktor yg terlibat dan bervariasinya kepentingan yg mereka wakili.

Tahap Formulasi Kebijakan

- ▶ Masalah yg telah masuk ke agenda kebijakan dibahas oleh para pembuat kebijakan.
- ▶ Masalah tersebut didefinisikan utk dicari alternatif pemecahan yg terbaik.
- ▶ Dibuat banyak alternatif utk penyelesaian masalah.
- ▶ Masing-2 alternatif bersaing utk dipilih.
- ▶ Setiap aktor kebijakan akan bersaing utk menentukan alternatif.
- ▶ Informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah

Tahap Adopsi Kebijakan

- Dari banyak alternatif kebijakan yg ditawarkan oleh para perumus kebijakan, akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tsb diadopsi dg dukungan para aktor (misal mayoritas legislatif) atau konsensus antaraktor.
- Informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif yg ditawarkan

Tahap Implementasi Kebijakan

- Pada tahap ini alternatif kebijakan yg telah ditetapkan tadi dilaksanakan oleh unit-unit administratif dg memobilisasi berbagai sumberdaya.
- Bisa terjadi implementasi kebijakan ini memperoleh atau tdk memperoleh dukungan dr para pelaksana.
- Informasi konsekuensi sekarang dan masa lalu diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya

Tahap Evaluasi Kebijakan

- Kebijakan yg telah diimplementasikan kemudian dinilai utk melihat sejauh mana atau tingkat keberhasilan kebijakan yg dibuat telah mampu memecahkan masalah utk meraih dampak yg diinginkan.
- Perlu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yg menjadi dasar utk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yg diinginkan.
- Informasi mengenai kinerja atau hasil dari kebijakan

Bentuk-bentuk Kebijakan Distributif

- ▶ Subsidi pupuk, pestisida, dan alat-alat pertanian agar petani mau menanam padi unggul.
- ▶ Penyediaan alat kontrasepsi gratis
- ▶ Raskin
- ▶ Kartu sehat
- ▶ Kompensasi BBM
- ▶ Beasiswa

Kebijakan Kompetitif Regulatif

- ▶ Kebijakan atau program yang dimaksudkan untuk membatasi siapa yang boleh menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masy.
- ▶ Asumsi yang dipakai:
 - ▶ Barang dan jasa yang dibutuhkan merupakan barang langka sehingga tidak mungkin mengizinkan semua masuk di dalamnya contoh frekuensi radio.
 - ▶ Ada keperluan untuk menstandarisasi jenis barang/jasa demi keselamatan konsumen

Kebijakan Kompetitif...(lanjut)

- ▶ Karena sifatnya yang demikian dalam kebijakan kompetitif juga terkandung kebijakan yang bersifat
 - ▶ distributif karena dengan mengatur kompetisi pemerintah memberikan pangsa pasar yang menguntungkan bagi pihak yang diberi lisensi.
 - ▶ Protektif regulatif karena pemerintah menetapkan standart dalam pemberian pelayanan oleh provider kepada masyarakat.

Kebijakan Kompetitif...(lanjut)

- ▶ Contoh-contoh kebijakan kompetitif adalah:
 - ▶ Ijin trayek bus, pesawat udara, kapal
 - ▶ Ijin penggunaan frekuensi radio, televisi
 - ▶ Ijin pendirian sekolah, perguruan tinggi
 - ▶ Ijin pendirian usaha

Kebijakan Protektif Regulatif

- ▶ Kebijakan atau program-program yang bersifat protektif dibuat oleh pemerintah dengan maksud untuk melindungi masyarakat dengan mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh sektor swasta.
- ▶ Aktivitas-aktivitas yang dapat merugikan atau membahayakan masyarakat tidak akan diijinkan untuk dijual di pasar oleh sektor swasta.
- ▶ Kondisi yang dipertimbangan sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat harus diatur oleh pemerintah.

Kebijakan Protektif

- ▶ Contoh-contoh kebijakan protektif
 - ▶ Ijin peredaran obat
 - ▶ Pelabelan halal pada makanan
 - ▶ Peraturan tentang pengolahan limbah industri
 - ▶ Ijin kelayakan terbang pesawat
 - ▶ Pencantuman label merokok membahayakan konsumen
 - ▶ Ketentuan tentang upah minimum provinsi/kabupaten
 - ▶ Perda Miras

Kebijakan Redistributif

- ▶ Kebijakan redistributif adalah kebijakan atau program yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan dapat meredistribusikan kekayaan, hak kepemilikan, dan nilai-nilai yang lain diantara berbagai kelas sosial masyarakat atau etnisitas di dalam masyarakat.
- ▶ Tujuan kebijakan redistributif adalah untuk mencegah ketimpangan yang makin lebar pada masyarakat.
- ▶ Asumsi yang dipakai dalam pembuatan kebijakan ini adalah bahwa kompetisi yang terjadi di dalam masyarakat akan menghasilkan pemenang dan pecundang.

Kebijakan Redistributif

- ▶ Berbagai contoh kebijakan redistributif adalah:
 - ▶ Pajak progresif
 - ▶ Mencegah adanya deskriminasi rasial atau gender
 - ▶ Program pelatihan kerja untuk orang miskin
 - ▶ Program Reformasi agraria

Pergeseran paradigma dalam kebijakan publik

ASPEK	GOVERNMENT	GOVERNANCE
PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN	Pemerintah	<ul style="list-style-type: none">❖ Pemerintah❖ Stakeholder❖ Analisis Kebijakan❖ Independent Think Thank
PENETAPAN KEBIJAKAN	Pemerintah	Pemerintah
ANALISIS KEBIJAKAN	<ul style="list-style-type: none">○ Pemerintah○ Public Contractor○ Government Think Thank	<ul style="list-style-type: none">❖ Stakeholder❖ Analisis Kebijakan❖ Independent Think Thank

Aktor-aktor Dlm Perumusan Kebijakan

- ▶ Para pemeran serta resmi: agen-agen pemerintah (birokrasi), presiden (eksekutif), legislatif dan yudikatif.
- ▶ Pemeran serta tdk resmi: kelompok-2 kepentingan, partai politik, warganegara individu.

Badan-badan administrasi

- ▶ Hal ini berkaitan erat dg pemahaman kebijakan sbg apa yg dilakukan oleh pemerintah mengenai masalah ttt.
- ▶ Badan-2 administrasi juga menjadi sumber utama mengenai usul-usul pembuatan UU dlm sistem politik, bahkan juga scr aktif melakukan lobi dan menggunakan tekanan-2 dlm penetapan UU.

Presiden (eksekutif)

- ▶ Keterlibatan presiden dlm perumusan kebijakan dpt dilihat dlm rapat-rapat kabinet. Bahkan presiden terlibat scr personal dlm perumusan kebijakan.
- ▶ Presiden juga membentuk komisi penasehat yg terdiri dr warganegara maupun pejabat-pejabat yg ditunjukan utk menyelidiki kebijakan ttt dan mengembangkan usul-usul kebijakan.

Lembaga Yudikatif

- ▶ Lembaga ini mempunyai kekuasaan yg cukup besar utk mempengaruhi kebijakan publik melalui pengujian kembali (peninjauan yudisial) suatu UU atau peraturan.
- ▶ Tinjauan yudisial mrpk kekuasaan pengadilan utk menentukan apakah tindakan-2 yg diambil oleh cabang-2 eksekutif maupun legislatif sesuai konstitusi atau tdk.

Lembaga Legislatif

- ▶ Setiap UU menyangkut persoalan-2 publik hrs mendapatkan persetujuan dr lembaga legislatif.
- ▶ Keterlibatan lembaga legislatif dlm perumusan kebijakan dpt dilihat dr mekanisme dengar pendapat, penyelidikan-2 dan kontak-2 yg mereka lakukan dg pejabat-2 administratif, kelompok-2 kepentingan dll.

Kelompok Kepentingan

- ▶ Kelompok kepentingan menjalankan fungsi artikulasi kepentingan (menyatakan tuntutan-2 dan memberikan alternatif-2 tindakan kebijakan).
- ▶ Memberikan informasi kpd para pejabat publik mengenai sifat serta konsekuensi-2 yg mungkin timbul dr usul-2 kebijakan yg diajukan.
- ▶ Kelompok kepentingan memberikan sumbangan yg berarti bagi rasionalitas pembentukan kebijakan publik.

Partai-Partai Politik

- ▶ Partai politik pada dasarnya lebih berorientasi kpd kekuasaan dibandingkan dg kebijakan publik. Tapi dlm masyarakat modern, partai politik seringkali melakukan agregasi kepentingan (berusaha utk mengubah tuntutan-2 ttt dr kelompok-2 kepentingan mjd alternatif kebijakan).

Warganegara Individu

- ▶ Individu warganegara dpt mengambil peran aktif dlm pembuatan kebijakan melalui pemilu.
- ▶ Melalui pemilu warganegara memilih para pembentuk kebijakan puncak. Shg pemilu mrpk metode yg penting dr pengaruh warganegara dlm pembentukan kebijakan krn hal ini memungkinkan warganegara utk memilih para pejabat dan sedikit banyak menginstruksikan pejabat-2 ini mengenai kebijakan ttt.

Formulasi Kebijakan Publik

- ▶ **PERUMUSAN MASALAH.**
- ▶ **AGENDA SETTING.**
- ▶ **POLICY PROBLEM FORMULATION.**
- ▶ **POLICY DESIGN.**



Perumusan Masalah Kebijakan

Batasan Masalah :

Jika terdapat gejala yang dirasakan sebagai kesulitan bersama oleh sekelompok masyarakat dan hanya dapat diatasi melalui intervensi pemerintah

Masalah Publik

- ▶ SUATU KONDISI DAN ATAU SITUASI YANG MENGHASILKAN KEBUTUHAN-KEBUTUHAN ATAU KETIDAK PUASAN PADA RAKYAT, UNTUK MANA PERLU DICARIKAN CARA-CARA PENANGGULANGANNYA (JAMES E. ANDERSON, 1979).
- ▶ KEBUTUHAN MANUSIA YANG PERLU DIATASI ATAU DIPECAHKAN (CHARLES O. JONES, 1984).
- ▶ *ISSUES*, MERUPAKAN PROBLEM-PROBLEM UMUM YANG BERTENTANGAN (KONFLIK) SATU SAMA LAIN (*CONTRAVERSIAL PUBLIC PROBLEMS*). *NOT ALL PROBLEMS BECOME PUBLIC, NOT ALL PUBLIC PROBLEMS BECAME ISSUES, AND NOT ALL ISSUES ARE ACTED ON IN GOVERNMENT.*

Masalah Publik

- ▶ Kondisi atau situasi yg menimbulkan kebutuhan atau ketidakpuasan pada sebagian orang yg menginginkan pertolongan (Budi Winarno).
- ▶ Kondisi atau situasi yg menghasilkan kebutuhan-2 atau ketidakpuasan shg perlu dicarikan cara-2 penanggulangannya (James E. Anderson)
- ▶ Kebutuhan-2 atau ketidakpuasan-2 manusia yg harus dipecahkan (Charles O. Jones).

Karakteristik Masalah Kebijakan

- ▶ Suatu masalah akan menjadi masalah kebijakan bila masalah tersebut ***diartikulasikan***. Jadi, ada orang atau kelompok yg menggerakkan ke arah tindakan utk mengatasi masalah tsb.
- ▶ Bila ada kelompok masyarakat yg mempy pendapatan rendah, tetapi menerima kondisi ini dan tidak ada sesuatupun yg dilakukan oleh pihak lain atas namanya, maka hal ini tidak dpt dikatakan sbg masalah kebijakan.

Karakteristik Masalah Kebijakan (2)

- ▶ Ada perhatian dari masyarakat yg terorganisir,
- ▶ Hanya dpt dicapai melalui tindakan publik dg penanganan yg sistematis, struktural dan serius pemerintah bersama-sama masyarakat,
- ▶ Mempunyai dampak yg luas shg tidak dpt diselesaikan secara individu,
- ▶ Konsekuensinya mencakup orang-2 yg tidak secara langsung terlibat.
- ▶ Masalah bisa masuk ke agenda pemerintah atau tdk tergantung pada sifat dukungan pihak-2 yg berkepentingan thdp masalah tsb.

Karakteristik Masalah Kebijakan (3)

- ▶ Terdapat 2 proses penting dalam mengidentifikasi masalah, yaitu persepsi dan definisi. Persepsi merupakan penerimaan (receiving) dari suatu peristiwa yang mempunyai konsekuensi terhadap orang atau kelompok. Definisi merupakan interpretasi dari peristiwa, memberinya makna dan membuatnya jelas. Hal ini berarti bahwa suatu masalah juga melibatkan pandangan subyektif seseorang.

Ciri Pokok Masalah Kebijakan

- ▶ ***Saling ketergantungan.*** Masalah-2 kebijakan dlm satu bidang (misalnya energi) kadang-2 mempengaruhi masalah-2 kebijakan dlm bidang lain (misalnya pelayanan kesehatan dan pengangguran). Jadi, masalah-2 kebijakan bukan mrpk kesatuan yg berdiri sendiri, namun mrpk bagian dari seluruh sistem masalah yg disebut sbg *messes*.

Lanjutan...

- ▶ **Subyektivitas.** Masalah kebijakan adalah hasil pemikiran dlm konteks lingkungan tertentu. Masalah tdk dpt mendefinisikan dirinya sendiri, tetapi harus didefinisikan oleh individu maupun kelompok yg berkepentingan. Proses ini melibatkan pengalaman-2 subyektif individu yg bersangkutan. Misalnya Keluarga-2 di kota memandang sampah rumah tangga sbg problem utama yg perlu dipecahkan.

Lanjutan...

- ▶ **Sifat buatan.** Masalah-2 kebijakan hanya mungkin ketika manusia membuat penilaian mengenai keinginannya utk mengubah beberapa situasi masalah. Masalah kebijakan mrpk hasil penilaian subyektif manusia; masalah kebijakan itu juga bisa diterima sbg definisi yg sah dari kondisi sosial obyektif; dan karenanya masalah kebijakan dipahami, dipertahankan dan diubah secara sosial. Pendapatan per kapita yg rendah mjd masalah karena pemerintah berkeinginan utk meningkatkan kesejahteraan masy.

Lanjutan...

- ▶ ***Dinamika masalah kebijakan.*** Ada banyak solusi yg ditawarkan utk memecahkan suatu masalah sebagaimana terdapat banyak definisi thdp masalah-2 tsb. Cara pandang orang thdp masalah pada akhirnya akan menentukan solusi yg ditawarkan utk memecahkan masalah tsb.

Perbedaan dlm struktur dari tiga tipe masalah kebijakan (Tipologi Masalah Kebijakan)

Elemen	Struktur Masalah		
	Sederhana	Agak Sederhana	Rumit
Pengambil Keputusan	Satu atau beberapa	Satu atau beberapa	Banyak
Alternatif	Terbatas	Terbatas	Tidak terbatas
Kegunaan (nilai)	Konsensus	Konsensus	Konflik
Hasil	Pasti atau beresiko	Tidak pasti	Tidak diketahui
Probabilitas	Dapat dihitung	Tidak dapat dihitung	Tidak dapat dihitung

Struktur Masalah Sederhana

- ▶ Pemecahannya hanya melibatkan satu atau beberapa pembuat kebijakan, dg alternatif pemecahan terbatas, nilai dari pemecahan masalah disetujui, hasilnya lebih dpt dipastikan dg tingkat probabilitas yg dpt diperhitungkan. Misal: Penghentian PNS. Dlm hal ini sudah jelas ada pejabat tertentu yg berwenang menghentikannya, sdh ada aturannya, kapan dan dlm kondisi bgmn seorang PNS itu diberhentikan.

Struktur Masalah Agak Sederhana

- ▶ Pemecahannya melibatkan beberapa pembuat kebijakan, alternatif pemecahannya terbatas, nilai yg akan dikejar disetujui, tetapi hasilnya tidak pasti dg tingkat probabilitas yg sulit dihitung. Misal: Masalah pembebasan tanah utk pelebaran jalan yg perlu ganti rugi. Pemecahan masalah ini melibatkan banyak instansi, dan nilai yg akan dikejar adalah tercapainya konsensus harga antara pemilik tanah dan pemerintah.

Struktur Masalah Yang Rumit

- ▶ Pemecahannya melibatkan banyak pembuat kebijakan, alternatif pemecahannya tidak terbatas, nilai yg akan dikejar masih menimbulkan konflik, dan hasil akhirnya sangat sulit diketahui dg pasti karena tingkat probabilitasnya sangat sulit dihitung. Misal: Masalah kemiskinan. Orang cenderung setuju memecahkan masalah tsb, tetapi banyak alternatif kebijakan yg dpt digunakan utk memecahkannya, dan ketika memilih alternatif mana yg terbaik, sering timbul konflik.



Analisis Situasi Problematis (1)

- ▶ Berkenaan dg kehidupan manusia sehari-hari; terdapat kejadian atau fenomena yg seolah-olah tdk beraturan.
- ▶ Pemahaman yg berbeda-beda; mana yg bermakna dan mana yg tidak.
- ▶ Dlm situasi problematis dpt kita temukan masalah-2 kebijakan.

Karakteristik penting untuk mengenali adanya masalah kebijakan

- ▶ Menyangkut kepentingan masyarakat luas
- ▶ Serius, situasi tsb berada di atas ambang toleransi utk diabaikan begitu saja.
- ▶ Potensial menjadi serius, mungkin utk saat ini suatu situasi belum berkembang cukup serius, tetapi dlm jangka panjang akan menjadi sangat serius.
- ▶ Ada peluang utk memperbaiki, tidak semua situasi problematis layak menjadi masalah kebijakan jika dari sudut teknis, ekonomis, politis dan administratif tdk mungkin dipecahkan melalui kebijakan.

Identifikasi dan Pemetaan Masalah

- ▶ Pengenalan sifat masalah; analisis perlu mengenali apa sifat atau hakekat dr masalah kebijakan.
- ▶ Identifikasi faktor-faktor penyebab; pengenalan thdp sifat masalah juga berguna dlm mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dr timbulnya suatu masalah kebijakan.
- ▶ Pemetaan masalah; situasi problematis biasanya tdk dialami oleh semua penduduk. Lingkup permasalahan diperjelas siapa yg mengalami situasi tsb.

Kapan problema umum menjadi policy problems?

- ▶ BILA PROBLEMA BARU DAPAT MEMBANGKITKAN ORANG BANYAK UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN TERHADAP PROBLEMA-PROBLEMA ITU (*ONLY THOSE THAT MOVE PEOPLE TO ACTION BECOME POLICY PROBLEMS*).
- ▶ MASYARAKAT MEMPUNYAI “*POLITICAL WILL*” UNTUK MEMPERJUANGKAN PROBLEMA ITU MENJADI PROBLEMA KEBIJAKAN.
- ▶ PROBLEMA ITU DITANGGAPI POSITIF OLEH PENGAMBIL KEBIJAKAN, DAN MEREKA BERSEDIA *MEMPERJUANGKAN* PROBLEMA ITU MENJADI PROBLEMA KEBIJAKAN, DAN MEMASUKKAN DALAM *AGENDA PEMERINTAH*, SERTA *MENGUSAHAKAN* MENJADI KEBIJAKAN NEGARA.

Merumuskan masalah kebijakan

- ❑ **MENGHENDAKI PERUMUSAN MASALAH YANG BAIK DAN BENAR.**
- ❑ **MASALAH YANG TELAH DIRUMUSKAN DENGAN BAIK DAN BENAR, BERARTI SEPARO MASALAH SUDAH TERPECAHKAN .**
- ❑ **KEBERHASILAN DALAM MEMECAHKAN MASALAH MENGHENDAKI DIKETEMUKANNYA PEMECAHAN YANG BENAR ATAS MASALAH YANG BENAR.**
- ❑ **KEGAGALAN SERING TERJADI, KARENA KITA MEMECAHKAN MASALAH YANG SALAH DARI PADA MENDAPATKAN PEMECAHAN YANG SALAH TERHADAP MASALAH YANG BENAR.**

Merumuskan Masalah Kebijakan (2)

- ▶ Masalah kebijakan mrpk kondisi yg obyektif yg keberadaannya dpt diciptakan scr sederhana dg menentukan “fakta-2” apa yg ada dlm suatu kasus.
- ▶ Pandangan ini gagal utk mengenali bahwa fakta-fakta yg sama (misal: statistik pemerintah ttg kejahatan, polusi, kemiskinan) sering diinterpretasikan scr sangat berbeda oleh para pelaku kebijakan.
- ▶ Oleh karena itu, informasi sama yg relevan dg kebijakan dapat dan sering menghasilkan definisi dan penjelasan ttg suatu masalah yg saling berbenturan.

Merumuskan Masalah Kebijakan (3)

- ▶ Masalah kebijakan adalah kebutuhan, nilai-2 atau kesempatan2 yg tidak terealisasi tetapi yg dpt dicapai melalui tindakan publik (William N. Dunn)
- ▶ Masalah yg mempunyai dampak yg luas dan mencakup konsekuensi-2 bagi orang-2 yg secara langsung tdk terlibat (Budi Winarno, 2004).
- ▶ Mrpk kegiatan yg paling penting krn merupakan sistem petunjuk pokok atau mekanisme pendorong yg mempengaruhi keberhasilan semua fase analisis kebijakan.
- ▶ Memahami masalah kebijakan sangat penting krn analisis kebijakan lebih sering gagal krn mereka memecahkan masalah yg salah drpd memperoleh solusi yg salah terhadap masalah yg tepat.

Analisis Situasi Problematis (1)

- ▶ Berkenaan dg kehidupan manusia sehari-hari; terdapat kejadian atau fenomena yg seolah-olah tdk beraturan.
- ▶ Pemahaman yg berbeda-beda; mana yg bermakna dan mana yg tidak.
- ▶ Dlm situasi problematis dpt kita temukan masalah-2 kebijakan.

Analisis Situasi Problematis (2)

- ▶ Situasi problematis adalah situasi yg dianggap problematis secara sosial.
- ▶ Situasi yg mrpk masalah sosial yg menuntut pemecahan secara kolektif melalui penerapan suatu kebijakan publik tertentu.
- ▶ Dinyatakan problematis jika situasi itu terdapat jarak antara keadaan yg diinginkan dg keadaan yg senyatanya.

Karakteristik penting untuk mengenali adanya masalah kebijakan

- ▶ Menyangkut kepentingan masyarakat luas
- ▶ Serius, situasi tsb berada di atas ambang toleransi utk diabaikan begitu saja.
- ▶ Potensial menjadi serius, mungkin utk saat ini suatu situasi belum berkembang cukup serius, tetapi dlm jangka panjang akan menjadi sangat serius.
- ▶ Ada peluang utk memperbaiki, tidak semua situasi problematis layak menjadi masalah kebijakan jika dari sudut teknis, ekonomis, politis dan administratif tdk mungkin dipecahkan melalui kebijakan.

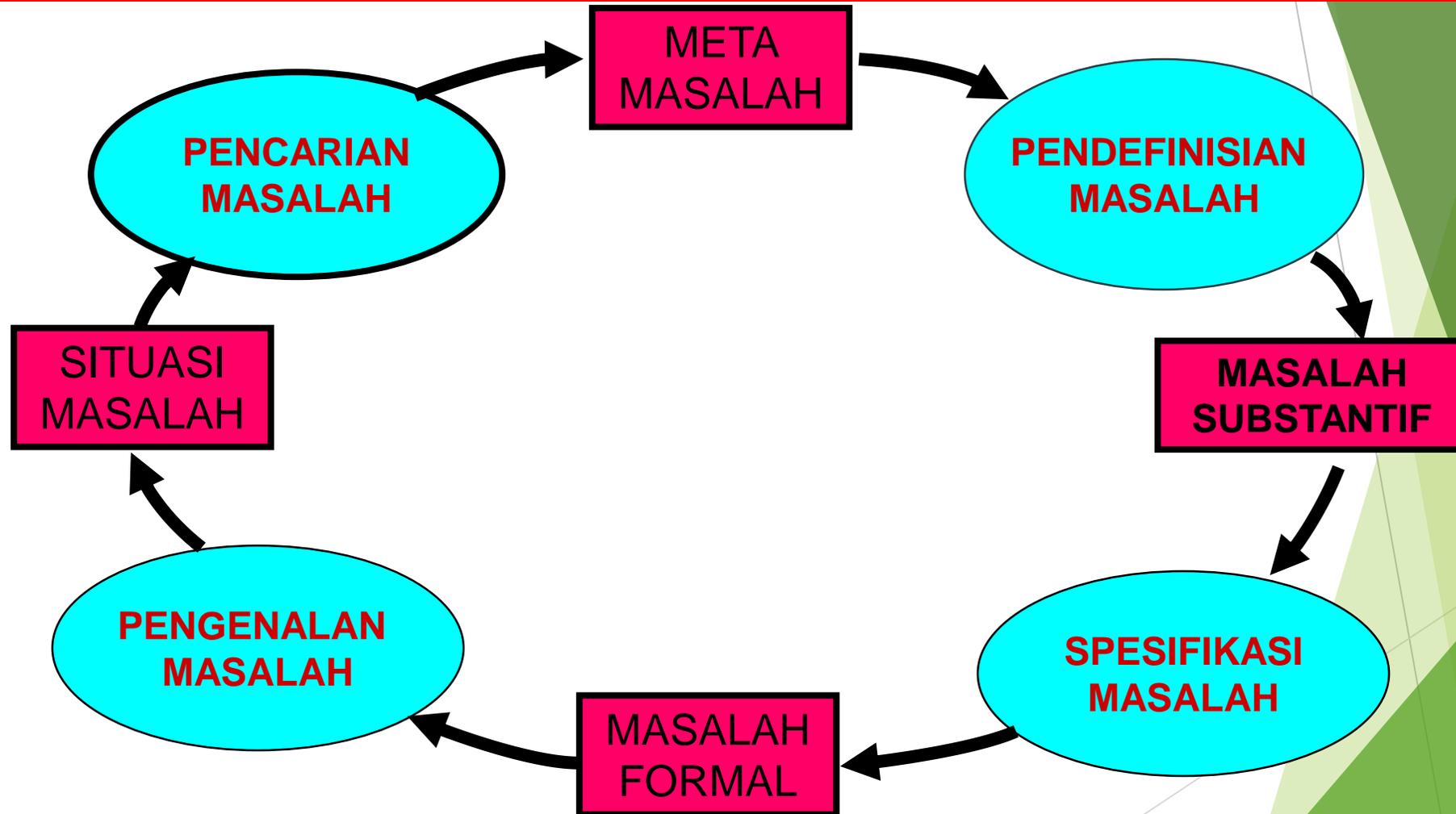
Identifikasi dan Pemetaan Masalah

- ▶ Pengenalan sifat masalah; analisis perlu mengenali apa sifat atau hakekat dr masalah kebijakan.
- ▶ Identifikasi faktor-faktor penyebab; pengenalan thdp sifat masalah juga berguna dlm mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dr timbulnya suatu masalah kebijakan.
- ▶ Pemetaan masalah; situasi problematis biasanya tdk dialami oleh semua penduduk. Lingkup permasalahan diperjelas siapa yg mengalami situasi tsb.

KEGIATAN PERUMUSAN MASALAH

- **AKTIVITAS PENGENALAN MASALAH,**
MENGHASILKAN SITUASI MASALAH.
- **AKTIVITAS PENCARIAN MASALAH,**
MENGHASILKAN META MASALAH.
- **AKTIVITAS PENDEFINISIAN MASALAH,**
MENGHASILKAN MASALAH SUBSTANTIF.
- **AKTIVITAS SPESIFIKASI MASALAH,**
MENGHASILKAN MASALAH FORMAL.

PERUMUSAN MASALAH



PERUMUSAN MASALAH KEBIJAKAN

NO	TAHAPAN	MASALAH
1	SITUASI MASALAH	MASYARAKAT RESAH DENGAN MARAKNYA PEREDARAN VCD PORNO.
2	META MASALAH	<ul style="list-style-type: none">▪ MUDAHNYA MEMPEROLEH VCD PORNO.▪ ISTRI RESAH SUAMI MINTA DILAYANI SEPERTI ADEGAN DALAM VCD PORNO.▪ SERING TERJADI PEMERKOSAAN SETELAH MELIHAT VCD PORNO.▪ TERJADI PERGAULAN DAN SEK BEBAS.▪ BANYAK ANAK REMAJA (GADIS) HASIL SEBELUM MENIKAH.▪ PERILAKU MASYARAKAT MUDAH MENIRU.▪ MORALITAS REMAJA MENGALAMI PENURUNAN.
3	MASALAH SUBSTANTIF	<ul style="list-style-type: none">▪ MUDAHNYA MENDAPATKAN VCD PRONO.▪ BUDAYA MUDAH MENIRU.▪ MORALITAS.
4	MASALAH FORMAL	<ul style="list-style-type: none">▪ SISTEM EDAR VCD PORNO.▪ MORALITAS.

NO	TAHAPAN	MASALAH
1	SITUASI MASALAH	PKL MENGGANGGU PENDUDUK.
2	META MASALAH	<ul style="list-style-type: none">▪ TEMPAT PKL TIDAK TERTATA RAPI.▪ PKL TUMBUH SUBUR.▪ PKL PRODUK SAMPAH.▪ PKL GANGGU KEINDAHAN KOTA.▪ PERILAKU PKL SEENAKNYA.
3	MASALAH SUBSTANTIF	<ul style="list-style-type: none">▪ PKL TUMBUH SUBUR.▪ TEMPAT PKL TIDAK TERTATA RAPI.▪ PERILAKU PKL.
4	MASALAH FORMAL	<ul style="list-style-type: none">▪ PERILAKU PKL.



Agenda Setting

Definisi Agenda Setting

- *Agenda setting* adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik.
- Karena dalam proses inilah ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan.
- Dalam proses ini, jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.
- Proses agenda setting dalam studi analisa kebijakan publik, dipahami secara berbeda-beda, tergantung pilihan mana di antara teknokratis, pluralis, konflik, atau deliberative yang dipakai.

Isu Kebijakan

- ▶ Masalah publik yg bertentangan satu sama lain atau masalah publik yg diperdebatkan.
- ▶ Isu kebijakan tdk hanya mengandung ketidaksetujuan mengenai serangkaian aksi yg aktual dan potensial, tetapi juga mencerminkan pandangan-2 yg berbeda ttg sifat dari masalah itu sendiri.

Makna Issue dan Agenda Kebijakan

- Issue ≠ kabar burung.
- Issue kebijakan (*policy issues*) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (*policy problem*).
- *Policy issues* lazimnya muncul karena telah terjadi silang pendapat diantara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan itu sendiri.
- Dunn (2003) : Issue kebijakan merupakan →
“produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu”.

- **Hogwood & Gunn (1986) :**

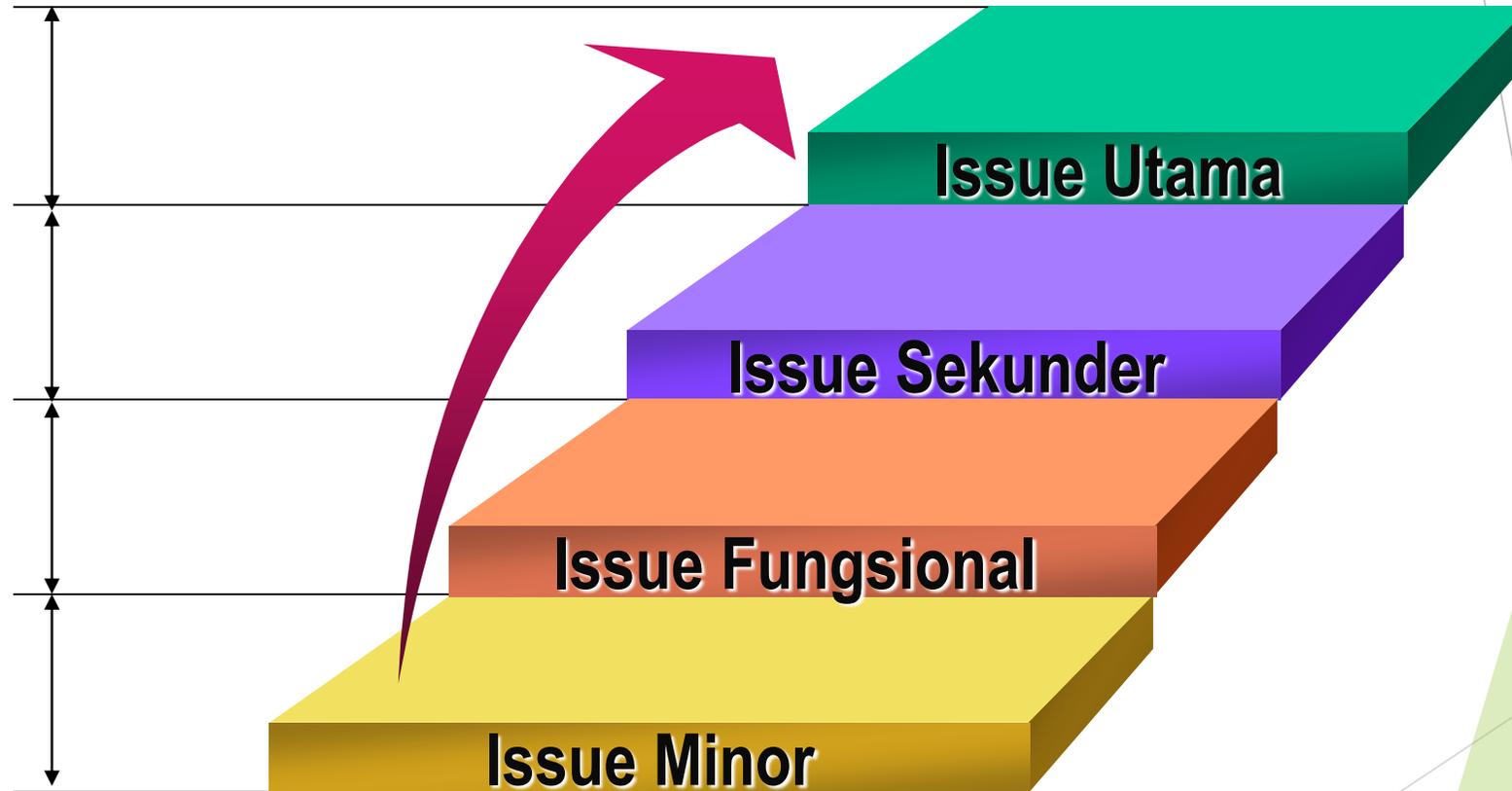
Issue bukan hanya mengandung makna adanya masalah atau ancaman, tetapi juga peluang-peluang bagi tindakan positif tertentu dan kecenderungan-kecenderungan yang dipersepsikan sbg memiliki nilai potensial yg signifikan.

- **Alfred & Friedland (1990) :**

Issue merupakan kebijakan-kebijakan alternatif (*alternative policies*), atau suatu proses yang dimaksudkan untuk menciptakan kebijakan baru atau kesadaran suatu kelompok mengenai kebijakan-kebijakan tertentu yg dianggap bermanfaat bagi mereka

- **Issue kebijakan muncul → karena telah terjadi konflik atau “perbedaan persepsional” diantara para aktor atau suatu situasi problematik yang dihadapi oleh masyarakat pada suatu waktu tertentu :**
 - **Issue kebijakan bersifat subyektif, karena dipengaruhi persepsi.**
 - **Adanya persepsi mempengaruhi status peringkat dari suatu issue kebijakan.**
 - **Dari segi peringkat, issue kebijakan dapat dibagi menjadi 4 kategori besar (Dunn, 2003) :**

Kategori Issue (Dunn, 2003)



Isu-isu utama (major issues)

- ▶ Ditemui pada tingkat pemerintah tertinggi.
- ▶ Meliputi ttg pertanyaan mengenai sifat dan tujuan organisasi pemerintah.
- ▶ Misal: apakah departemen kesehatan hrs berusaha menghilangkan kondisi yg menimbulkan kemiskinan (pertanyaan terkait dg misi).

Isu-isu sekunder (secondary issues)

- ▶ Terletak pada tingkat instansi pelaksana program.
- ▶ Berisi prioritas-prioritas program.
- ▶ Berisi definisi kelompok-2 sasaran dan penerima dampak.
- ▶ Misal: bagaimana mendefinisikan kemiskinan keluarga.

Isu-isu fungsional (functional issues)

- ▶ Terletak diantara tingkat program dan proyek.
- ▶ Berkaitan dg anggaran, keuangan, dan usaha utk memperolehnya.

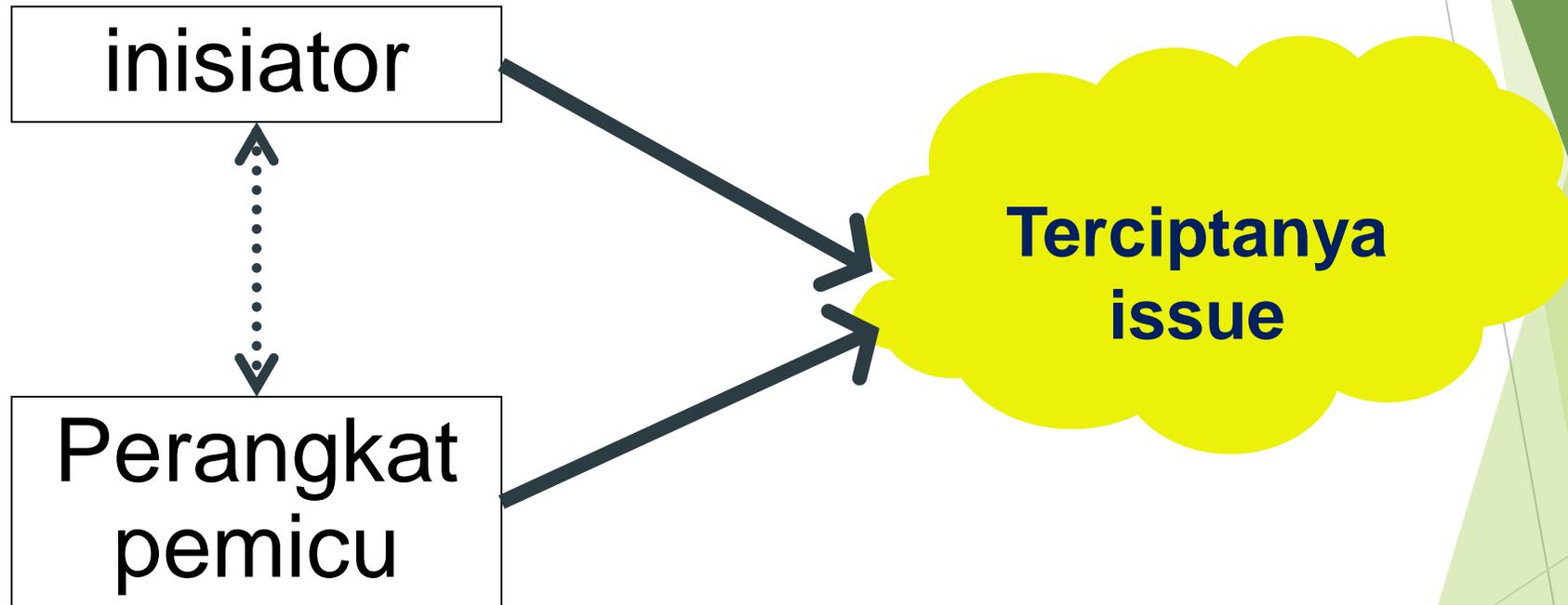
Isu-isu minor (minor issues)

- ▶ Ditemukan paling sering pada tingkat proyek-proyek yg spesifik.
- ▶ Isunya meliputi personal, staff, keuntungan bekerja, waktu liburan, jam kerja.

Kesimpulan isu bisa tampil ke agenda pemerintah

- ▶ ISSUES ITU DINILAI PENTING DAN MEMBAWA DAMPAK YANG BESAR PADA BANYAK ORANG.
- ▶ ISSUES TERSEBUT MENDAPATKAN PERHATIAN DARI PARA POLICY MAKER.
- ▶ ISSUES TERSEBUT SESUAI DENGAN PLATFORM POLITIK (PROGRAM POLITK).
- ▶ ISSUES TERSEBUT KEMUNGKINAN BESAR DAPAT PECAHKAN.

PENCIPTAAN ISSUE



Penciptaan isu (Cobb dan Elder)

- ▶ Isu dibuat oleh partai yg merasa melihat ketidakadilan atau bias (penyelewengan) dalam distribusi kekuasaan dan sumberdaya.
- ▶ Penciptaan isu demi kepentingan dan keuntungan personal atau kelompok ttt.
- ▶ Isu tercipta akibat peristiwa yg tak terduga.
- ▶ Isu dibuat oleh orang yg selalu ingin perbaikan.

Perangkat pemicu

Pemicu internal

- ▶ Bencana alam, peristiwa kemanusiaan yg tak terduga, perubahan teknologi, ketakseimbangan atau bias dlm distribusi sumberdaya dan perubahan ekologis.

Pemicu eksternal

- ▶ Aksi perang, inovasi dlm teknologi persenjataan, konflik internasional, pola alignment dunia.

MAKNA AGENDA SETTING

Mengedepankan masalah untuk ditangani pemerintah (Charles O. Jones)

Pencarian dan penyaringan issue
(Hogwood & Gunn)

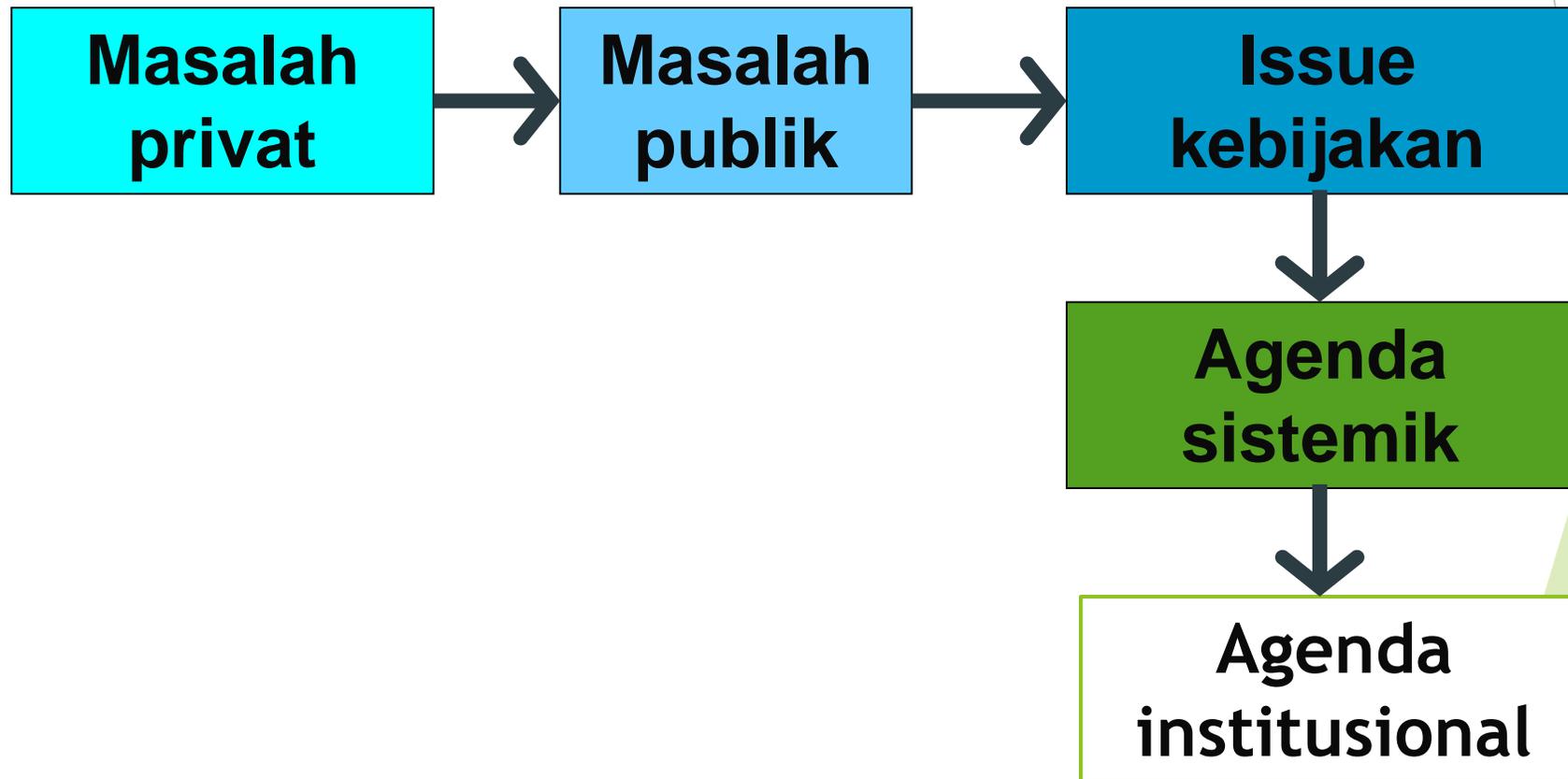
Pengaruh dan jendela kebijakan
(Kingdon)

**Makna Agenda
Setting**

MENGEDEPANKAN MASALAH KE HADAPAN PEMERINTAH

Aktifitas-2 fungsional	Kategori	Kedudukan dlm sistem	Output
Persepsi	Menge-de-pankan masalah ke hadapan pemerintah	Identifikasi masalah	Keharusan-keharusan untuk menyelesaikan masalah
Pendefinisian			
Agregasi			
Pengorganisa sian			
Perwakilan			

TRANSFORMASI AGENDA



Pengarah dan jendela kebijakan

- **(Kingdon)** Membahas mengapa beberapa persoalan muncul sbg agenda pemerintah, sedangkan yang lain tidak.
- Membahas ttg siapa saja yang mempengaruhi agenda pemerintah, dan mengapa mereka melakukan itu.
- Aliran proses yang memungkinkan hal itu terjadi :
 1. *Problems stream* (persoalan)
 2. *Policies stream* (kebijakan)
 3. *Politics stream* (politik)
- Dalam setiap aliran proses, keterlibatan para partisipan sama kuatnya.

Problems Stream :

- **Suatu permasalahan diperhatikan oleh pemerintah, karena :**
 - a. **Alat dan cara yg digunakan utk mendefinisikan kondisi sebagai masalah;**
 - b. **Merupakan kejadian khusus.**
 - c. **Aktor pemerintah memahami kondisi melalui *feed-back* dari program yang pernah ada.**
- **Kondisi → sesuatu yang berlangsung setiap hari.**
- **Kondisi menjadi masalah, jika :**
 - **Merasa harus merubah**
 - **Merusak nilai-nilai penting**

Politics Stream :

- **Perkembangan pada wilayah politik → dapat memicu adanya agenda kebijakan yang kuat.**
- **Misal :**
 - **Adanya perubahan *mood*/selera nasional**
 - **Adanya pemerintahan baru hasil pemilu**
 - **Distribusi ideologi dalam lembaga perwakilan**
 - **Peran berbagai kelompok kepentingan yang berhasil/gagal mengarahkan permintaan mereka thd pemerintah**

Policies Stream :

- **Terkait dengan proses mengkaitkan masalah dengan solusi, karena seringkali dalam perumusan kebijakan pemerintah sering abai mengkaitkannya.**
- **Dalam proses ini, teknokrat dan akademisi berupaya meyakinkan pihak birokrat atau politisi, melalui alternatif-alternatif solusi masalah**

Kapan policy problems menjadi government agenda?

- ▶ MASALAH ITU MEMPEROLEH PERHATIAN YANG LUAS ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DAPAT MENIMBULKAN KESADARAN MASYARAKAT.
- ▶ ADANYA PERSEPSI DAN PANDANGAN ATAU PENDAPAT PUBLIK YANG LUAS, BAHWA BEBERAPA TINDAKAN PERLU DILAKUKAN UNTUK MEMECAHKAN MASALAH ITU.
- ▶ ADANYA PERSEPSI YANG SAMA DARI MASYARAKAT, BAHWA MASALAH ITU ADALAH MERUPAKAN SUATU KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB YANG SYAH DARI BEBERAPA UNIT PEMERINTAHAN (COBB DAN ELDER).

Agenda Setting

Private Problems

Private Problems adalah masalah-masalah yang mempunyai akibat yang terbatas, atau hanya menyangkut pada satu atau sejumlah kecil orang yang terlibat secara langsung.

Public Problems

Public Problems adalah masalah-masalah yang mempunyai akibat lebih luas termasuk akibat-akibat yang mengenai orang-orang yang secara tidak langsung terlibat.

Political Issues

Issues adalah perbedaan pendapat masyarakat tentang solusi dalam menangani masalah (*policy action*).

Systematic Agenda: issue dirasakan oleh semua warga masyarakat politik yang patut mendapat perhatian publik dan issue tersebut berada dalam yuridiksi kewenangan pemerintah.

Sistemic Agenda

Institutional Agenda: serangkaian issue yang secara tegas membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang aktif dan serius dari pembuat keputusan yang syah / otoritatif.

Institutional Agenda

Agenda Pemerintah

- ▶ SUATU ISTILAH YANG PADA UMUMNYA DIGUNAKAN UNTUK MENGGAMBARAKAN ISSUES YANG DINILAI OLEH PUBLIC PERLU DIAMBIL SUATU TINDAKAN (CHARLES O. JONES, 1984).
- ▶ SUATU KESEPAKATAN UMUM, BELUM TENTU TERTULIS, TENTANG ADANYA SUATU MASALAH PUBLIK YANG PERLU MENJADI PERHATIAN BERSAMA, DAN MENUNTUT CAMPUR TANGAN PEMERINTAH UNTUK MEMECAHKANNYA (MUHADJIR, 1995).

Agenda Systemis

- ▶ Terdiri dari semua isu yg umumnya dirasakan oleh anggota komunitas politik sbg isu yg pantas mendapat perhatian dan dianggap sbg persoalan di dlm yurisdiksi yg sah dlm otoritas pemerintah.
- ▶ Utk mendapat akses ke agenda sistemis, sebuah isu hrs mendapat perhatian luas dr sebagian besar persepsi publik shg isu itu menjadi perhatian otoritas publik.

Agenda Institusional

- ▶ SUATU ISTILAH YANG PADA UMUMNYA DIGUNAKAN UNTUK MENGGAMBARAKAN ISSUES YANG DINILAI OLEH PUBLIC PERLU DIAMBIL SUATU TINDAKAN (CHARLES O. JONES, 1984).
- ▶ SUATU KESEPAKATAN UMUM, BELUM TENTU TERTULIS, TENTANG ADANYA SUATU MASALAH PUBLIK YANG PERLU MENJADI PERHATIAN BERSAMA, DAN MENUNTUT CAMPUR TANGAN PEMERINTAH UNTUK MEMECAHKANNYA (MUHADJIR, 1995).

Agenda Institutional (lanjutan)

- ▶ Seperangkat item yg scr eksplisit muncul mjd perhatian dan pertimbangan serius oleh otoritas pengambil keputusan.
- ▶ Mungkin mrpk item lama yg muncul krn diulas scr reguler atau mjd perhatian scr periodik. Mungkin juga mrpk item baru.
- ▶ Sebuah isu tdk akan masuk ke agenda institutional jika sebelumnya isu itu tdk muncul di agenda sistemik.

Perlu dicermati bgmn peran dan pengaruh riil dari agenda setters

- ▶ Posisi dari klpk tsb akan semakin kokoh jika mereka dipersepsikan sbg memiliki legitimasi dan kekuasaan atas isu tsb, shg pandangan mereka atas isu yg diperdebatkan dianggap memiliki nilai keabsahan ttt.
- ▶ Bgmn perwujudan dari distribusi kekuasaan riil yg berlangsung di suatu neg (organisasi atau masyarakat scr keseluruhan).

Ada 5 hal yg menyebabkan masalah kebijakan dpt masuk dlm agenda pemerintah

- ▶ Bila tdpt ancaman thdp keseimbangan kelompok (groups equilibrium)
- ▶ Kepemimpinan politik
- ▶ Timbul krisis atau peristiwa yg luar biasa
- ▶ Adanya gerakan-2 protes dan tindakan-2 kekerasan shg menarik perhatian pembuat kebijakan
- ▶ Adanya masalah khusus (isu-isu politik) yg menarik media massa shg menyebabkan isu tsb semakin menarik perhatian pembuat kebijakan dan masyarakat.

AGENDA SETTING

NO	TATARAN	MASALAH
1	PRIVATE PROBLEM	PKL MENGGANGGU PARA PENGGUNA JALAN.
2	PUBLIC PROBLEM	SETIAP PENDUDUK TERGANGGU DENGAN KEBERADAAN PKL.
3	POLICY ISSUES	<ul style="list-style-type: none">▪ PKL PERLU DITERTIBKAN.▪ PEMBATAAN URBAN.▪ PERLU PEMBINAAN PKL..
4	SYSTEMIC AGENDA	<ul style="list-style-type: none">▪ PERILAKU PKL.▪ PENATAAN PKL.
5	INSTITUTIONAL AGENDA	<ul style="list-style-type: none">▪ SIKAP DAN PERILAKU PKL.

Agenda setting

NO	TATARAN	MASALAH
1	PRIVATE PROBLEM	VCD PORNO MERESAHKAN ORANG TUA YANG ANAKNYA TELAH REMAJA.
2	PUBLIC PROBLEM	VCD PORNO MERESAHKAN: <ul style="list-style-type: none">▪ ORANG TUA YANG ANAKNYA TELAH REMAJA.▪ ORANG TUA YANG ANAKNYA BELUM REMA.▪ PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BELUM MEMILIKI ANAK.
3	POLICY ISSUES	<ul style="list-style-type: none">▪ MENGHENTIKAN PRODUKSI VCD PORNO.▪ MENGATUR DAN MENGAWASI SISTEM EDAR VCD PORNO.▪ MEMBENTENGI KELUARGA DENGAN MENINGKATKAN IMAN DAN TAQWA.
4	SYSTEMIC AGENDA	<ul style="list-style-type: none">▪ PENGATURAN DAN PENGAWASAN SISTEM EDAR VCD PORNO.▪ MEMBENTENGI IMAN DAN TAQWA.
5	INSTITUTIONAL AGENDA	<ul style="list-style-type: none">▪ MEMBENTENGI IMAN DAN TAQWA.

POLICY DESIGN

- ▶ PENGKAJIAN PERSOALAN.
- ▶ PENETAPAN TUJUAN.
- ▶ PERUMUSAN ALTERNATIF.
- ▶ PENYUSUNAN MODEL.
- ▶ PENENTUAN KRITERIA.
- ▶ PENILAIAN ALTERNATIF.
- ▶ PERUMUSAN REKOMENDASI.

Pengkajian persoalan

- ▶ Tujuannya utk menemukan dan memahami hakekat permasalahan yg berhasil diidentifikasi yg dihadapi oleh organisasi.
- ▶ Perlu dirumuskan masalah yg dihadapi oleh organisasi secara jelas dan tegas.
- ▶ Tunjukkan hubungan kausal (sebab akibat) dari permasalahan yg telah berhasil diidentifikasi sebelumnya.

Penetapan tujuan dan sasaran

- ▶ Tujuan adalah akibat yg secara sadar ingin dicapai atau ingin dihindari.
- ▶ Tujuan dan sasaran kebijakan intervensi hrs dirumuskan dg jelas dan tegas.
- ▶ Dapat dijadikan dasar pijakan dlm merumuskan alternatif intervensi apa yg diperlukan.
- ▶ Dpt dijadikan standar penilaian apakah langkah intervensi yg dilakukan dpt dikatakan berhasil atau gagal.

Perumusan alternatif

- ▶ Alternatif kebijakan mrpk sejumlah alat atau cara yg dpt dipergunakan utk mencapai sejumlah tujuan dan sasaran
- ▶ Setiap alternatif kebijakan diawali dg penjelasan kerangka logika berkaitan dg kemungkinan-2 yg akan muncul dlm kerangka mengintervensi masalah
- ▶ Memilih dan menetapkan alternatif kebijakan yg paling memberi peluang utk dpt mencapai tujuan dan sasaran.

Penyusunan model

- ▶ Masing-2 alternatif kebijakan dituangkan dlm bentuk hubungan kausal antarmasalah yg dihadapi organisasi.
- ▶ Model ini dituangkan dlm skematis model.
- ▶ Penyusunan model ini dimaksudkan utk memudahkan analisis sekaligus memilih alternatif kebijakan mana yg hrs dipilih.

KRITERIA PENILAIAN

- **Technical Feasibility.**
- **Economic And Financial Feasibility.**
 - **Political Viability.**
- **Administrative Operability.**

KRITERIA PENILAIAN (1)

- ***TECHNICAL FEASIBILITY***, MELIHAT SAMPAI SEJAUHMANA SETIAP ALTERNATIF KEBIJAKAN DAPAT MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN YANG TELAH DITETAPKAN. KRITERIA PENILAIAN INI LEBIH MENEKANKAN PADA ASPEK “***EFEKTIVITAS***” SUATU ALTERNATIF LANGKAH INTERVENSI DALAM MENCAPAI APA YANG MENJADI TUJUAN DAN SASARAN YANG TELAH DITETAPKAN.
- ***ECONOMIC AND FINANCIAL FEASIBILITY***, MELIHAT SAMPAI SEJAUH-MANA SETIAP ALTERNATIF KEBIJAKAN MEMBUTUHKAN BIAYA, DAN SEBERAPA BESAR KEUNTUNGAN YANG DAPAT DIPEROLEH DARI SETIAP ALTERNATIF KEBIJAKAN. KRITERIA INI LEBIH MENEKANKAN PADA ASPEK “***EFISIENSI***” DARI SETIAP ALTERNATIF KEBIJAKAN PUBLIK MENCAPAI APA YANG MENJADI TUJUANNYA. KRITERIA INI DAPAT MENGGUNAKAN TEKNIS ***COST AND BENEFIT ANALYSIS***.

KRITERIA PENILAIAN (2)

- ***POLITICAL VIABILITY***, MELIHAT SEBERAPA JAUH EFEK MAUPUN DAMPAK POLITIK YANG AKAN DITIMBULKAN OLEH SETIAP ALTERNATIF KEBIJAKAN. **DAMPAK POLITIK** DARI ALTERNATIF KEBIJAKAN INI AKAN DILIHAT DARI TINGKAT AKSEBILITAS (*ACCEPTABILITY*), KECOCOKKAN DENGAN NILAI DI MASYA-RAKAT (*APPROPRIATENESS*), RESPONSIVITAS (*RESPONSIVENESS*), KESESUAIAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (*LEGAL SUITABILITY*), DAN PEMERATAAN (*EQUITY*). KRITERIA INI, INTINYA UNTUK MEMPEROLEH DUKUNGAN POLITIK (*POLITICAL SPONSORSHIP*) TERHADAP ALTERNATIF KEBIJAKAN YANG DIUSULKAN.
- ***ADMINISTRATIVE OPERABILITY***, MELIHAT SEBERAPA BESAR KEMUNGKINAN SUATU ALTERNATIF KEBIJAKAN DAPAT BERHASIL DILAKSANAKAN DALAM KONTEK POLITIK, EKONOMI, SOSIAL, DAN ADMINISTRASI YANG BERLAKU. KRITERIA ***ADMINISTRATIVE OPERABILITY*** INI AKAN MELIHAT DARI DIMENSI OTORITAS INTANSI PELAKSANA, KOMITMEN KELEMBANGAAN, KAPABILITAS STAF DAN DANA, DAN DUKUNGAN ORGANISASI.

NO	KRITERIA	DIMENSI
1	TECHNICAL FEASIBILITY	EFEKTIVITAS PENCAPAIAN TUJUAN.
2	ECONOMIC AND FINANCIAL FEASIBILITY.	EFISIENSI (BIAYA DAN HASIL).
3	POLITICAL VIABILITY.	<ul style="list-style-type: none">▪ ACCEPTABILITY.▪ APPROPRIATENESS.▪ RESPONSIVENESS.▪ LEGAL SUITABILITY.▪ EQUITY.
4	ADMINISTRATIVE OPERABILITY.	DAPAT DIIMPLEMENTASIKAN PADA KONTEKS SOSIAL, POLITIK, DAN ADMINISTRASI YANG BERLAKU.

PENILAIAN ALTERNATIF

NO	KRITERIA	ALTERNATIF			KET
		A	B	C	
1	Technical Feasibility				
2	Economic and financial feasibility.				
3	Political Viability.				
4	Administrative Operability.				
JUMLAH					
RANGKING					

Perumusan rekomendasi

- ▶ Alternatif kebijakan yg memperoleh nilai (score) terbesar dg menggunakan kriteria penilaian mrpk alternatif kebijakan yg sebaiknya dipilih.
- ▶ Scr teknis kebijakan tadi visibel dlm mencapai tujuan dan sasaran (efektivitas), scr ekonomis tdk banyak membutuhkan biaya besar dan dpt mendatangkan hasil besar (efisiensi), secara politis paling banyak memperoleh dukungan (political sponsorship), dan scr administratif sangat besar kemungkinannya dpt dilaksanakan (administrative operability).

POLICY PAPER

- ▶ PENDAHULUAN.
- ▶ FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK.
 - A. AGENDA SETTING.
 - B. POLICY PROBLEM FORMULATION.
 - C. POLICY DESIGN.
 - 1. TUJUAN KEBIJAKAN.
 - 2. ALTERNATIF KEBIJAKAN.
 - 3. PENILAIAN DAN PERANGKINGAN ALTERNATIF.
 - 4. REKOMENDASI ALTERNATIF KEBIJAKAN.
- ▶ STRATEGI PELAKSANAAN ALTERNATIF KEBIJAKAN YANG DIPILIH.
- ▶ PENUTUP.

POLICY DESIGN

- ▶ PENGKAJIAN PERSOALAN.
- ▶ PENETAPAN TUJUAN.
- ▶ PERUMUSAN ALTERNATIF.
- ▶ PENYUSUNAN MODEL.
- ▶ PENENTUAN KRITERIA.
- ▶ PENILAIAN ALTERNATIF.
- ▶ PERUMUSAN REKOMENDASI.

**Hal-Hal Penting Yang Harus
Diperhatikan Dalam
Pembuatan Kebijakan**

Etika kebijakan

- ▶ Semua tahapan proses pembuatan keputusan cenderung berhubungan dg masalah etika mulai dari tahap agenda setting, formulasi, adopsi, implementasi dan evaluasi.

Herbert Simon mengatakan kecenderungan para analis kebijakan akan berusaha untuk mengoptimalkan hasil pilihannya yaitu memilih kebijakan yang menguntungkan secara ekonomis tetapi yang cenderung terjadi kebijakan dipilih hanya untuk memuaskan kelompok tertentu saja

Paradigma

- ▶ Cara pandang yg dianut oleh masyarakat ilmiah pada masa ttt.
- ▶ Isu ini terkait dengan muncul ajaran baru tentang Reiventing Government untuk itu kemudian berdampak pada kebijakan-kebijakan harus memperhatikan
 - ▶ Pemerintah hanya bertanggung jawab pada tersusunnya kebijakan saja yang melaksanakan tidak harus pemerintah
 - ▶ Penyusunan kebijakan harus melibatkan masy
 - ▶ Penyusunan kebijakan harus mendorong tumbuhnya inovasi dan proses belajar di masy
 - ▶ Kebijakan yang dirumuskan harus berorientasi pada kepentingan pasar yaitu tidak lain kebutuhan masyarakat
 - ▶ Kebijakan preventif perlu dilakukan dan hasil atau kinerja diutamakan

Kepalsuan kebijakan

- ▶ Perumus kebijakan memiliki motif khusus yaitu menggantikan kepentingan publik ke dlm kepentingan pribadi/ klpk/ jabatan.
- ▶ Motif menggunakan uang neg dg tdk memperdulikan kegunaan riilnya bagi kepentingan publik sangat merugikan keuangan neg.

Kualitas kebijakan

Kualitas suatu kebijakan dpt diketahui dr proses (diproses dg data dan informasi yg akurat, menggunakan metode yg sesuai, mengikuti tahapan-2 yg rasional, melibatkan para ahli serta masy yg berkepentingan), isi (mrpk jalan keluar terbaik dlm rangka memecahkan masalah), konteks (dirumuskan dlm suasana yg benar-2 bebas dr rekayasa, bebas dr tekanan atau paksaan pihak-2 yg berpengaruh)

FORECASTING

- ▶ Adl kegiatan untuk menentukan informasi faktual ttg situasi masa depan atas dasar informasi yang ada sekarang

Tujuan:

- ▶ 1. Memberi informasi ttg kebijakan di masa depan dan konsekuensinya
- ▶ 2. Melakukan kontrol / intervensi kebijakan guna mempengaruhi perubahan, dan mengurangi resiko lbh besar

Jenis Forecasting

- ▶ 1. Proyeksi
- ▶ Ramalan yg didasarkan pd ekstrapolasi bdsr kecenderungan ms lalu, asumsi ms dpn py pola sama dg ms lalu
- ▶ Contoh :
- ▶ Proyeksi Jumlah Penduduk Th 2020 berdasar data penduduk 5 th terakhir

2. Prediksi

- ▶ Ramalan yg ddasarkan pada asumsi teoritik
- ▶ Contoh :
- ▶ Teori Supply and Demand, harga normal pada ttk temu supply demand. Jika tidak terjadi keseimbangan mk tjd black market

3. Perkiraan

- ▶ Ramalah yang didasarkan pada penilaian para pakar tentang situasi masyarakat yang akan datang.
- ▶ Contoh:
- ▶ Perkiraan kenaikan harga IHSG pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI

Jenis-Jenis Masa Depan

- ▶ 1. Masa Depan Potensial
- ▶ Yaitu situasi ms dpn yang mungkin terjadi yg berbeda dg situasi sosial yg mmg tjd
- ▶ Contoh:
- ▶ Akibat penebangan hutan terus menerus maka jenis masa depan yang terjadi misal bencana alam, kenaikan suhu udara, musnahnya satwa, dll

2. Masa Depan Masuk Akal (plausible future)

- ▶ Yaitu masa depan atas dasar asumsi yang akan terjadi jika pembuat kebijakan tidak melakukan intervensi.
- ▶ Contoh :
- ▶ Bencana alam banjir, kekeringan, musnahnya satwa dapat dihindarkan jika pemerintah tidak melakukan kontrol terhadap penebangan hutan

3. Masa Depan Normatif

- ▶ Yaitu masa depan yang seharusnya terjadi
- ▶ Contoh :
- ▶ Jika tanaman dipelihara dan diberi pupuk sesuai aturan maka dapat diprediksi berapa kg peningkatan hasil panen tanaman

Implementasi Kebijakan

The background of the slide is white with abstract green geometric shapes on the right side. These shapes include overlapping triangles and polygons in various shades of green, from light lime to dark forest green. The shapes are positioned on the right side of the slide, creating a modern, minimalist aesthetic.

- ▶ Kompleksitas implementasi tidak hanya terlihat pada banyaknya aktor / unit organisasi yg terlibat tp krn banyaknya variabel yang saling mempengaruhi dan berinteraksi satu dengan yang lain.

George C Edward III

- ▶ Variabel yang mempegaruhi implementasi:
- ▶ 1. Komunikasi
- ▶ 2. Sumber daya (SDM + Financial)
- ▶ 3. Disposisi (watak)
- ▶ 4. Struktur Organisasi (SP dan SOP)

Merilee S Grindle (1980)

- ▶ Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh :
- ▶ 1. Isi Kebijakan
- ▶ 2. Lingkungan Implementasi

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983)

- ▶ Variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu:
- ▶ 1. Karakteristik Masalah
- ▶ 2. Karakteristik kebijakan / Undang-Undang
- ▶ 3. Variabel Lingkungan

Karakteristik Masalah

- ▶ 1. Tingkat kesulitan teknis masalah
 - ▶ Mudah dipecahkan : kekurangan air minum
 - ▶ Sulit dipecahkan : kemiskinan, pengangguran, korupsi
- ▶ 2. Tingkat kemajemukan kelompok sasaran
 - ▶ Homogen / Heterogen

- ▶ 3. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi
 - ▶ Sulit : jika mencakup populasi
 - ▶ Mudah : jumlah kelompok sasaran tidak besar
- ▶ 4. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan
 - ▶ Mudah : jk hanya bersifat kognitif / pengetahuan
 - ▶ Sulit : perubahan perilaku

Karakteristik Kebijakan

- ▶ 1. Kejelasan isi kebijakan
- ▶ 2. Dukungan teoritis
- ▶ 3. Alokasi Sumber daya financial
- ▶ 4. Dukungan antar institusi pelaksana
- ▶ 5. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana
- ▶ 6. Komitmen aparat
- ▶ 7. Akses kelompok luar untuk berpartisipasi

Monitoring Kebijakan

- ▶ Merupakan evaluasi terhadap implementasi kebijakan.
- ▶ Monitoring dilakukan untuk mendeteksi kesalahan saat implementasi untuk dapat dilakukan perubahan
- ▶ Evaluasi dilakukan untuk melihat tingkat kinerja suatu kebijakan guna memberikan input bagi kebijakan yang akan datang

Tujuan Monitoring

- ▶ 1. Menjaga kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran
- ▶ 2. Meminimalkan resiko dengan menemukan masalah sedini mungkin
- ▶ 3. Dapat melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan bila hasil monitoring mengharuskan hal itu

Data dan Informasi Monitoring dapat di peroleh melalui:

- ▶ 1. Metode Dokumentasi
- ▶ 2. Metode Survey
- ▶ 3. Metode Observasi Lapangan
- ▶ 4. Metode Wawancara
- ▶ 5. Metode Campuran
- ▶ 6. *Focus Group Discusson* (FGD)

Jenis Monitoring (Dunn, 1994)

- ▶ 1. Kepatuhan (Compliance)
 - ▶ → Utk memnentukan tk kepatuhan implementator thd standar dan prosedur yg telah ditetapkan
- ▶ 2. Pemeriksaan (Auditing)
 - ▶ → Utk melihat sejauh mana sumber daya dan pelayanan sampai pd kelompok sasaran

▶ 3. Akuntansi (Accounting)

▶ → Utk mengkalkulasi perubahan sosial dan ekonomi yg tjd setelah implementasi kebijakan

▶ 4. Eksplanasi (Explanation)

▶ → Untuk menjelaskan perbedaan antara hasil dan tujuan kebijakan

Pendekatan Monitoring

Pendekatan	Jenis Pengendalian	Jenis Informasi yg Dibutuhkan
Akuntansi Sistem Sosial	Kuantitatif	Informasi lama dan / atau baru
Eksperimentasi Sosial	Manipulasi Langsung	Informasi baru
Pemeriksaan Sosial	Kuantitatif dan / atau Kualitatif	Informasi baru
Sintesis Riset dan Praktek	Kuantitatif dan / atau Kualitatif	Informasi lama

Sumber : Dunn, 1994



► Evaluasi Kebijakan

Definisi

- ▶ Evaluasi adalah kegiatan utk menilai tingkat kinerja kebijakan
- ▶ Evaluasi dilaksanakan bila kebijakan telah berjalan beberapa waktu
- ▶ Kebijakan Strategis perlu tenggang waktu yang panjang utk melakukan evaluasi
→ melihat Outcome
- ▶ Cth : Evaluasi thd UU No 32 Th 2004 ttg Otonomi Daerah

- ▶ Kebijakan sifatnya teknis evaluasi dpt dilakukan dalam kurun waktu relatif lebih cepat
- ▶ Cth : Peraturan pemakaian helm standart bagi pengendara sepeda motor

Tujuan Evaluasi

- ▶ 1. Menentukan tingkat kinerja kebijakan
- ▶ 2. Mengukur tingkat efisiensi kebijakan
- ▶ 3. Mengukur tk keluaran (Output / Outcome)
- ▶ 4. Mengukur dampak kebijakan
- ▶ 5. Mengetahui adanya penyimpangan
- ▶ 6. Input bagi kebijakan selanjutnya

Kebijakan sebagai suatu proses



Metodologi Evaluasi Program

Jenis Evaluasi	Pengukuran Kondisi		Kelompok Kontrol	Informasi yg diperoleh
	Sebelum	Sesudah		
Single program after only	Tidak	Ya	Tidak Ada	Keadaan kelompok sasaran
Single program before after	Ya	Ya	Tidak Ada	Perubahan kelompok sasaran
Comparative after only	Tidak	Ya	Ada	Keadaan kelompok sasaran dan kelompok kontrol

Ujian Semesteran

1. Jelaskan kategori isu dan beri contoh !
2. Jelaskan tataran masalah hingga masuk ke dalam Agenda Setting!
Beri Contoh konkrit
3. Jelaskan kriteria penilaian
4. Apa yang anda ketahui tentang forecasting ? Jelaskan jenis-jenis forecasting !
5. Jelaskan tujuan dari monitoring dan evaluasi kebijakan !
6. Jelaskan arti pentingnya studi kebijakan public !
7. Jelaskan lingkup kebijakan public baik secara vertical maupun horizontal !
8. Ada banyak teori menyangkut kebijakan public, jelaskan teori kebijakan public menurut Thomas Dye!
9. Jelaskan dan beri contoh tentang tipe-tipe kebijaksanaan !
10. Jelaskan Ciri pokok masalah kebijakan ! Beri Contohnya !

Referensi

- ▶ Anderson, J.A. (2003). *Public Policy Making*. Fifth Edition, Thousand Oaks, California: Sage Publication.
- ▶ Anonimous. (1988). *Sistem Administrasi Negara RI*, Jakarta:Lembaga Administrasi Negara RI.
- ▶ Birkland, T.A. (2011). *An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making*, Third Edition, New York: Routledge.
- ▶ Grindle, M.S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University
- ▶ *Handbook of Public Policy, Analysis Theory, Politics, and Methods*. CRC Press. Boca Raton, London, New York
- ▶ Hill, Michael. (2005). *The Public Policy Process*, Fourth Edition, Pearson Longman.

- ▶ Islamy, M.I. 2007. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- ▶ Jenkins, Williams J. 1978. *Policy Analysis: A Political and Organizational Perspective*. London: Martin Robertson.
- ▶ Jones, C.O. (1984). *An Introduction to the Study of Public Policy*. California: Cole Publishing Company.
- ▶ Kingdon, J.W. (1984). *Agendas, Alternative and Public Policy*. Michigan: Harper Collins Publisher.
- ▶ Lantz, Paula. (tanpa tahun). *Academy Role in Public Policies in Health Care*.
- ▶ Lester, Lames V. & Joseph Stewart, Jr. 2000. *Public Policy: An Evolutionary Approach*. Australia: Wadsworth.
- ▶ M. Irfan Islamy. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta